JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
JOURNAL OF PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT
JMKP

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA TERHADAP PERSEPSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I Gede Made Artha Dharmakarja,
Politeknik Keuangan Negara STAN
dharmakarja@pknstan.ac.id

I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma
Politeknik Keuangan Negara STAN
igbayuantakusuma@pknstan.ac.id

Chandra Maulana Putra
Politeknik Keuangan Negara STAN
chandramaulanap@gmail.com

ARTICLE INFORMATION

Diterima Pertama
16 Oktober 2020

Dinyatakan Diterima
18 Desember 2020

Kata Kunci:
Dana desa, partisipasi, akuntabilitas, persepsi, APBDes

Klasifikasi JEL:
H72, H77

ABSTRACT

This study aims to determine the perceptions of rural communities in village financial management in the form of APBDes. How perceptions affect the level of participation of village communities in the preparation of APBDes and accountability for their use. The object of this research is the villagers who are involved and attend the discussion of APBDes management. Primary data in this study is data collected through questionnaires and interviews with respondents. Meanwhile, the secondary data of this research comes from village fund report data. The sampling technique chosen was Stratified Random Sampling, with a total sample of 49 people. This research technique uses multiple linear regression data analysis. The results showed that first, community participation and village financial accountability had a simultaneous effect on the perception of the village income and expenditure budget. Second, community participation does not have a partial that effect on perceptions of village income and expenditure budgets. Third, village financial accountability has a partial effected on perceptions of village income and expenditure budgets

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol. 4, No. 2, (2020), Hal. 31-40

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan dana desa untuk meningkatkan pembangunan di Desa. Alokasi dana untuk desa ini, diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Sumber Dana ini diharapkan mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Indonesia, 2017). Tujuan lain dari dana desa ini, pemerintah mengharapkan adanya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat desa, serta desa dapat menjadi subjek pembangunan.

Dana desa diberikan sejak tahun 2015. Jumlah alokasi dana desa mengalami kenaikan setiap tahun dan saat ini nilainya mencapai Rp 1 milyar untuk setiap desa. Dana desa wajib dikelola secara mandiri oleh Kepala Desa dan Aparat Desa. Tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawabannya dana desa seluruhnya disajikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes). Melalui APBdes diharapkan tujuan alokasi dana desa akan dicapai secara optimal, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan dana desa yang akuntabel merupakan bentuk pertangungjawaban dari tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas pengelolaan keuangan ini juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penelitian Karyanto (2016) terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan gender dari kepada desa. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengukur ketepatan waktu dalam menyampaian laporan pertanggungjawaban dana desa. Pernyataan tentang akuntabilitas dana desa oleh lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan korupsi anggaran dana desa disebabkan oleh pengelolaan anggaran yang tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa (ICW, 2018). Penelitian Kurnia dan Rahi (2019) dilakukan menemukan pertanggungjawaban dana desa belum optimal dalam hal akuntanbilitas dan transparansi. Hal itu disebabkan kurangnya pemahaman pembuatan laporan pertangungjawaban, kebingungan karena perubahan peraturan dan keterlambatan pencairan dana desa.

Arfiansyah (2020) menemukan penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa juga diperlukan agar tujuan alokasi dana desa dapat tercapai dengan optimal. Hasil penelitian lainnya menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa mampu menunjang kesejahteraan masyarakat desa. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat rendah mengakibatkan pengelolaan keuangan desa menjadi tidak transparan dan tidak akuntabel (Syamsi, 2014). Penggunaan dana desa juga yang belum efektif mencapai tujuan karena masyarakat belum secara aktif terlibat dalam pengelolaan dana desa (Aziis,2016) Kondisi ini mengakibatkan dana desa yang dialokasikan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran. Penelitian dana desa di desa Masalembu Sumenep, menemukan pengelolaan keuangan desa yang belum transparan dan partisipatif karena pendampingan pemerintah kabupaten belum optimal (Hanafie et al, 2019)

Sedangkan penelitian di Saemba kec Mori Kabupaten Morowali, dana desa telah dilakukan perencanaan yang melibatkan masyarakat sehingga dana desa dapat dimanfaatkan dalam bentuk pembangunan, namun dalam pertanggungjawaban dana desa ini belum tepat waktu dan masih memerlukan bimbingan dari pemerintah (Tandi, 2018). Penelitian lainnya terkait pelatihan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang dikembangkan oleh Pemerintah hasil yang belum maksimal karena kemampuan sumber daya manusia yang terbatas (Lusdani dan Ta'dung, 2020).

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat diketahui adanya beberapa permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan dana di desa. Selain masalah klasik korupsi, ketidaksiapan personal dan pemahaman atas peraturan masih menjadi kendala. Faktor partisipasi juga berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana di desa. Meskipun pemerintah telah mengatur mekanisme pengelolaan keuangan yang melibatkan kehadiran masyarakat dalam setiap proses perumusannya. Pemerintah juga telah berusaha melakukan pendampingan untuk menumbuhkan partisipasi.

Pelatihan keuangan desa juga dilakukan untuk menghasilkan pertanggungjawaban yang standar dan terukur. Partisipasi dan akuntabilitas ini akan mempunyai kaitan dalam membentuk persepsi masyarakat. Penelitian tetang persepsi masyarakat desa oleh Hanun (2020) menyatakan belum adanya kesiapan pemerintahan desa dalam membuat laporan keuangan desa berdasarkan peraturan tentang Desa. Di desa Bajur, persepsi masyarakat terhadap peraturan pengeloaan keuangan desa sudah baik walaupun terdapat masalah berupa pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana awal yang disepakati bersama (Ibrahim et al, 2017). Dari beberapa penelitian tersebut, diketahui bahwa persepsi tersebut terbentuk dari keterlibatan masyarakat, keputusan yang sudah memperhatikan pendapat dan kebutuhan warga, pengelolaan keuangan yang

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol. 4, No. 2, (2020), Hal. 31-40

transparan, informatif dan terbuka, dan hasil yang dapat dirasakan manfaatnya.

Pengelolaan dana desa memang sangat menarik untuk dilakukan penelitian, mengingat alokasi dana desa ini merupakan program baru pemerintah sejak tahun 2015. Permasalahan yang dihadapi dana desa ini perlu mendapatkan solusi secara tepat. Berdasarkan referensi tersebut, penelitian yang akan dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa berupa APBDes. Persepsi tersebut antara lain dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan APBDes dan akuntabilitas penggunaannya. Penelitian Escobar dan Ross (2014) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan persepsi dan akuntabilitas. Dana desa yang ditransfer pemerintah pusat ke desa merupakan salah satu bentuk desentralisasi fiskal. Penelitian lain yang menguji persepsi para manajer oleh Wang dan Wan (2007) menunjukkan bahwa partisipasi yang melibatkan dalam pengelolaan administratif secara signifikan dapat menjelaskan kepercayaan publik atau masyarakat.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Partisipasi

Partisipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dengan terlibat langsung diharapkan pemerintah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan program pemerintah dapat menuju sasaran yang tepat dan bermanfaat secara optimal. Selain itu keikut sertaan masyarakat juga termasuk terlibat dalam program pemerintah dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Menurut Theresia et al dalam Selfia et al (2020), bentuk partisipasi masyarakat pada kegiatan pembangunan dapat dilakukan pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Partisipasi masyarakat ini dalam bentuk pengambilan pendapat dan keputusan, terlibat dalam pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan. Partisipasi ini juga berupa memperoleh manfaat hasil pembangunan dan ikut dalam evaluasi melalui umpan balik.

Dalam kaitannya dengan dana desa, partisipasi masyarakat diperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan terlibat melakukan pengawasan atas pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalah gunaan.

2.2 Akuntabilitas

Desa sebagai bagian suatu negara wajib melaksanakan kegiatan pemerintahan. Salah satunya yang dilakukan oleh aparat desa yaitu melakukan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa ini wajib memperhatikan *good governance* sebagai salah satu ukuran dalam penilaian kinerja suatu desa. Prinsip *good governance* ini meliputi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini juga disampaikan Mardiasmo (dalam Suwanda et al, 2019), yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, dan efisien akan menambah akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat dan menciptakan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas juga menunjukkan proses kerja sama antara masyarakat dan *stakeholders* untuk memperbaiki kinerja pemerintah.

Pendapat O'Donnel dalam Lusdani dan Ta'dung (2020), menjelaskan akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal merupakan pertangungjawaban antara atasan dan bawahan sehingga digunakan sebagai alat untuk melakukan pengawasan. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) merupakan pertangungjawaban antara pihak yang mempunyai kedudukan yang sejajar sehingga dapat digunakan sebagai fungsi pengecekan dan melengkapi. Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa akuntabilitas vertikal dapat diwujudkan berupa pertangungjawaban antara aparat desa dengan pemerintah kecamatan atau kabupaten, sedangkan akuntabilitas horisontal merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa.

Dengan demikian dalam pengelolaan APBDes sebagai proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, perlu dilakukan kajian akuntabilitas, dalam rangka tersedianya informasi yang handal dan akurat sebagai bentuk pertangungjawaban pemerintah desa.

2.3 Persepsi

Program pemerintah dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan motivasi dan dukungan dari semua pihak. Motivasi untuk mewujudkan program ini dapat muncul dari tindakan individu dan dipengaruhi oleh persepsi masyarakat.

Persepsi merupakan proses seseorang untuk memilih, mengolah dan menafsirkan informasi yang diterima sehingga dapat menciptakan pengertian atau makna dari suatu obyek (Kotler, 2001). Pendapat lain disampaikan Robbins dan Judge (dalam Wibowo, 2015), menyatakan persepsi adalah proses individu untuk mengorganisir dan menginterprestasikan tanggapan atas kesan mereka dan memberikan makna pada lingkungan, tetapi apa yang dirasakan dapat berbeda secara substansial dari pada realitas obyektif.

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol. 4, No. 2, (2020), Hal. 31-40

Dengan demikian persepsi merupakan proses yang sangat individu sehingga hasilnya sangat sulit ditentukan terlebih lagi ada kemungkinan bias dan distorsi dapat diperbaiki dengan meningkatkan kepedulian, saling mengingatkan dan meningkatkan interaksi antar individu agar muncul kepercayaan dan empati antar individu.

Persepsi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa juga diharapkan mampu mewujudkan tujuan alokasi dana desa yaitu meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan perekonomian desa. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian lebih rinci mengenai persepsi masyarakat terkait pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa, sehingga pemanfaatan dana desa dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel

2.4 Hipotesis

Persepsi merupakan proses seseorang untuk memilih, mengolah dan menafsirkan informasi yang diterima sehingga dapat menciptakan pengertian atau makna dari suatu obyek. Motivasi memanfaatkan dana desa untuk masyarakat dapat muncul dari tindakan partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap dana desa. Penelitian persepsi masyarakat terhadap dana desa dilakukan di Desa Kertajaya, yang telah memanfaatkan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan persepsi masyarakat menunjukan kecenderungan baik. (Isti et al, 2017)

Penelitian lain mengenai persepsi masyarakat terkait dana desa belum memuaskan karena pertama, penggunaan anggaran pembangunan tidak optimal walaupun telah dimusyawarahkan, kedua dana desa dikelola oleh pihak yang tidak kompeten, ketiga, dana desa telah digunakan tepat waktu (Solichin dan Samsul, 2018).

Persepsi masyarakat terhadap Pemanfaatan Dana Desa di Desa Kanonang 2 Kecamatan Kawangkoan Barat adalah baik berupa dampak pada Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Komaling et al, 2020)

Persepsi *stakeholder* ditemukan pemerintah desa masih belum siap dalam implementasi pelaporan keuangan desa karena latar belakang pendidikan, kurang pemahaman teknologi, budaya sikap praktis dalam pelaporan, serta kurangnya intensitas pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Hanun, 2020).

Berdasarkan deskripsi diatas dapat dirumuskan hipotesis:

H1: Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Berpengaruh Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Dalam menjamin terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang optimal adanya partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi program yang direncanakan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Hasil penelitian terkait partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa menemukan bahwa partisipasi masyarakat mampu menunjang kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan apabila masyarakat tidak dilibatkan maka pengelolaan keuangan desa menjadi kurang transparan dan akuntabel (Syamsi, 2014). Penelitian lainnya menemukan penggunaan dana desa belum efektif disebabkan masyarakat tidak secara aktif terlibat dalam pengelolaan dana desa (Aziis, 2016). Penelitian dana desa di desa Masalembu Sumenep, menemukan pengelolaan keuangan desa tidak transparan dan partisipatif karena pendampingan pemerintah kabupaten belum optimal (Hanafie et al, 2019)

Sedangkan penelitian di Saemba kec Mori Kabupaten Morowali, perencanaan dana desa telah melibatkan masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, namun kendala pertanggungjawaban dan masih memerlukan bimbingan dari pemerintah (Tandi, 2018).

Kajian ICW, menemukan bahwa minimnya keikutsertaan masyarakat untuk pengawasan dana desa akan mengakibatkan kerugian keuangan negara dan menjadi salah satu bentuk tindakan korupsi.
Pengelola dana desa, juga mengalami kendala akibat kurangnya pemahaman aparat desa mengenai standar akuntasi pemerintah, adanya perubahan regulasi dan implementasi yang belum memadai dari sarana dan prasarana Pemerintah desa.

Berdasarkan deskripsi di atas dapat dirumuskan hipotesis:

H2: Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Akuntabilitas merupakan bentuk pertangungjawaban atas pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan dana desa yang akuntabel merupakan bentuk pertangung jawaban dari tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas pengelolaan keuangan ini juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Akuntabilitas dana desa sebagai bentuk pertangung jawaban ternyata dapat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan gender dari kepada desa sehingga berpengaruh juga kepada ketepatan waktu dalam menyampaian laporan pertanggungjawaban dana desa (Karyanto, 2016).

Permasalahan terkait dana desa diungkapkan pada hasil penelitian dana desa dalam pengelolaannya tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa (ICW, 2018). Penelitian terkait akuntabilitas oleh ICW (2018) menemukan korupsi di desa, khususnya terkait anggaran desa, disebabkan

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol. 4, No. 2, (2020), Hal. 31-40

pengelolaan anggaran yang besar tetapi implementasinya tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa.

Penelitian pengelolaan dana desa oleh Kurnia, Rahi (2019) dilakukan di Luhak nan Duo, menemukan dana desa belum dipertangungjawabkan secara optimal dalam hal akuntanbilitas dan transparansi karena kurang pemahaman mengenai laporan pertangung jawaban, sering terjadi perubahan peraturan yang membingungkan pihak pengelola dan keterlambatan pencairan dana desa. Hasil penelitian Arfiansyah (2020) diketahui penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan deskripsi di atas dapat dirumuskan hipotesis:

H3: Akuntabilitas Keuangan Desa Berpengaruh Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Pagaran Tapah adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena merupakan tempat tinggal salah satu penulis. Objek dari penelitian ini adalah warga desa tersebut yang terlibat dan menghadiri pertemuan yang membahas pengelolaan APBDes. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang dikumpulkan dengan menyebar kuisioner dan disertai dengan hasil wawancara dengan responden. Sedangkan data sekunder penelitian ini adalah berasal dari data laporan desa terkait.

Teknik pengambilan sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara *Stratified Random Sampling*. Jumlah sampel yang diperoleh yaitu dari warga mengumpulkan kuesioner adalah sebanyak 49 orang. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan kuesioner.

Responden diminta untuk mengisi kuesioner dengan memilih jawaban dalam skala Likert antara 1 (menunjukkan pernyataan sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (menunjukkan pernyataan sangat setuju). Variabel partisipasi diukur dengan 8 pernyataan menggunakan instrumen yang mencakup peran responden yang mengikuti penyusunan rencana anggaran, menyampaikan pendapat, terlibat dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Variabel akuntabilitas diukur dengan 6 pernyataan menggunakan instrumen yang mencakup penyusunan dan pertanggungjawaban telah melibatkan seluruh warga desa, keterbukaan informasi, keterkaitan program/kegiatan dengan kebutuhan, kejelasan sumber anggaran, adanya bukti pengeluaran yang sah. Variabel persepsi diukur dengan 6 pernyataan menggunakan instrumen yang mencakup anggaran desa telah disusun sesuai kesepakatan, pelaksanaan sesuai perencanaan, penggunaan sesuai bukti pembayaran, hasil yang dicapai berupa manfaat, kemajuan desa dan memenuhi harapan warga desa.

Teknik penelitian ini menggunakan analisis data regresi linear berganda. Untuk mengetahui pengaruh antar variabel, hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan uji simultan (F-test) dan uji parsial (t-test). Sedangkan uji asumsi dalam penelitian ini mengunakan adalah uji normalitas, uji validitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas.

Desa Pagaran Tapah adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam. Desa ini terbagi menjadi empat dusun, yaitu Dusun Setia, Dusun Mekar Indah, Dusun Sei Dagang, dan Dusun Lubuk Jambu serta memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.697 jiwa yang terdiri dari 2.441 jiwa laki-laki dan 2.256 jiwa perempuan. Sebagian besar mata pencaharaian masyarakat Desa Pagaran Tapah adalah petani kelapa sawit dan karet. Hal itu sesuai dengan komoditas utama yang dikembangkan oleh masyarakat yaitu kelapa sawit dan karet. APBDes yang digunakan dalam pembangunan desa antara lain bersumber dari Dana Desa. Dana Desa yang diperoleh Desa Pagaran Tapah pada tahun 2016 sebesar Rp649.848.000,00, selanjutnya naik menjadi Rp824.804.000,00 pada tahun 2017 dan sebesar Rp1.020.070.000,00 pada tahun 2018. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden ini dikelompokkan berdasarkan atas umur, jenis kelamin dan pendidikan. Berdasarkan kelompok umur, karakteristik responden penelitian ini didominasi oleh responden yang berusia antara umur 20 tahun sampai dengan umur 30 tahun.

Tabel 1. Distribusi Responden Menurut Umur

Umur 20 - 30 th	27
Umur 30 - 40 th	6
Umur 40 - 50 th	12
Lebih dari 50 th	4
Jumlah	49

Sumber: Data Primer, diolah pada Tahun 2020

Tabel berikutnya menjelaskan distribusi responden berdasarkan jenis kelamin. Tabel 2 di bawah ini menunjukkan responden berjenis kelamin perempuan jumlahnya hampir berimbang dengan responden yang berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 2. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol. 4, No. 2, (2020), Hal. 31-40

Laki-laki	23	46,94%
Perempuan	26	53,06%
Jumlah	49	100%

Sumber: Data Primer, diolah pada Tahun 2020

Berdasarkan jenjang pendidikan, responden didominasi oleh lulusan SMA atau sederajat.

Tabel 3. Distribusi Responden Menurut Pendidikan

SD/sederajat	8
SMP/sederajat	6
SMA/sederajat	31
Perguruan Tinggi	4
Jumlah	49

Sumber: Data Primer, diolah pada Tahun 2020

4.2 Hasil Analisis Regresi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya Partispasi Perencanaan APBDes (X1) dan Akuntabilitas APBDes (X2) terhadap Persepsi APBDes (Y) di Desa Pagaran Tapah kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, provinsi Riau.

Uji regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS for Windows diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12,579	4,347		2,893	,006
PARTISIPASI	,149	,092	,222	1,625	,111
AKUNTABILITAS	,340	,147	,315	2,314	,025

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$\hat{Y} = 12,579 + 0,149X1 + 0,340X2$

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X1 dan X2) secara simultan terhadap variabel dependen (Y) digunakan analisis F test, dengan nilai signifikansi pada tingkat 5%. Jika nilai signifikansi > 5%, maka gagal tolak Ho and H1 ditolak. Jika nilai signifikansi <0.05, maka tolak Ho and H1 diterima.

Tabel 5. Uji Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	56,066	2	28,033	4,855	,012[b]
Residual	265,607	46	5,774		
Total	321,673	48			

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS

Karena nilai signifikansi kurang dari 5% menunjukkan bahwa partisipasi dan akuntabiitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi. Jadi Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Berpengaruh Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dapat diterima.

Untuk mengetahui variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen, dilakukan uji t-test. Hipotesis penelitian ini menggunakan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi > 5%, maka gagal tolak Ho and H1 ditolak. Jika nilai signifikansi <0.05, maka tolak Ho and H1 diterima.

Berdasarkan hasil regresi diatas, nilai signifikansi t pada partisipasi sebesar 0,111. Nilai koefisien lebih dari 5% menunjukkan: gagal Tolak H0, tolak H1, artinya tidak ada hubungan secara parsial antara partisipasi dengan persepsi. Jadi Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tidak diterima.

Sedangkan nilai signifikansi t pada akuntabilitas adalah 0,025. Nilai koefisien kurang dari 5% menunjukkan tolak H0, terima H1, artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial akuntabilitas terhadap persepsi. Jadi Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan Akuntabilitas Keuangan Desa Berpengaruh Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa diterima.

Penilaian *Goodness of Fit* dan Interpretasi atas persamaan regresi diperoleh nilai adjusted R Square sebesar 0,138 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 6. Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,417[a]	,174	,138	2,4029	2,216

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Partisipasi

b. Dependent Variable: Persepsi

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian yang digunakan mampu menjelaskan sebesar 13,8% variasi dari variabel dependen. Sedangkan sisanya dijelaskan dalam variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian.

4.3 Pengujian Asumsi

Hasil uji normalitas yang dilakukan dengan tes Kolmogorov-Smirnov pada program SPSS memperoleh hasil bahwa variabel – variabel penelitian adalah valid dan telah memenuhi syarat normalitas.

Tabel 7. Hasil tes Kolmogorov-Smirnov

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol. 4, No. 2, (2020), Hal. 31-40

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		49
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,35233567
Most Extreme Differences	Absolute	,109
	Positive	,087
	Negative	-,109
Test Statistic		,109
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200[c,d]

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS

Hasil uji data sebanyak 49 dengan nilai sig 0,200 (lebih besar dari 5%), artinya data terdistribusi normal, dengan rata-rata (mean) mendekati 0.
Sedangkan hasil uji reliabilitas ditunjukkan oleh nilai Alpha Cronbach sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Nilai Hitung Alpha Cronbach	Keterangan
Partisipasi Perencanaan APBDes (X1)	8	0,725	Reliabilitas Tinggi
Akuntabilitas Keuangan (X2)	6	0,531	Reliabilitas Moderat
Persepsi Atas APBDes (Y)	6	0,661	Reliabilitas Moderat

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS

Untuk mengetahui adanya autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai 2,216. Dalam tabel Durbin-Watson dengan jumlah data n = 49 dan jumlah variabel k = 3, maka diperoleh nilai d berada diantara 1,6723 dan 2,3277. Karena hasil uji berada diantara kedua nilai tersebut, maka kesimpulannya Persamaan analisa regresi gagal tolak H0, artinya tidak terdapat autokorelasi.

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Nilai dari tolerance dan VIF masing-masing menunjukkan nilai tolerance yang dimiliki seluruh variabel bebas sebesar 0,966 (lebih besar dari 0,10) dan nilai VIF sebesar 1,035 (kurang dari 10).

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas model regresi dalam penelitian ini karena seluruh nilai signifikansi yang diperoleh dari pengujian dengan metode Glejser diperoleh nilai sig 0,222. Nilai α lebih dari 0,05 terhadap absolute residual (Abs_Res) sehingga dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1. Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Berpengaruh Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Berdasarkan hasil uji F, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas keuangan desa berpengaruh terhadap persepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Tiwinarni dan Taman (2018) yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik secara simultan terhadap Persepsi Masyarakat tentang Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Se-Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan akuntabilitas keuangan yang semakin meningkat secara simultan dapat mendorong persepsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) semakin baik.

Persepsi masyarakat tersebut tumbuh berdasarkan perhatian, penafsiran dan ingatan atas informasi yang diperoleh sebagaimana pendapat Kotler (2001). Informasi tersebut dapat diperoleh saat warga desa berpartisipasi dan terlibat langsung dalam seluruh proses pengelolaan APBDes yang diyakini akuntabilitasnya. Dengan perhatian dan penafsiran bahwa pengelolaan anggaran desa telah dilakukan secara terbuka , memenuhi ekspektasi dan memberi manfaat bagi masyarakat serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab akan membentuk persepsi bahwa hasil yang dicapai akan membawa dampak kemajuan bagi masyarakat. Berdasarkan persepsi tersebut, menurut McShane dalam Mardiyanto (2015), akan mendorong kepedulian dan empati sehingga masyarakat semakin aktif dalam setiap usaha yang memajukan kesejahteraan di desa.

4.4.2. Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Berdasarkan hasil uji parsial, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap persepsi APBDesa. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangemanan dkk (2018) dan Tiwinarni dan Taman (2018). Partisipasi tidak berpengaruh terhadap Persepsi APBDes karena adanya beberapa hambatan. Hal ini diungkapkan dalam penelitian lain yang menyatakan hambatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa masih lemah baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian dan waktu yang disebabkan dengan keputusan yang tidak bijaksana, komunikasi yang tidak interaktif, kurangnya kesadaran masyarakat, pendidikan yang rendah tidak ada

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol. 4, No. 2, (2020), Hal. 31-40

transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dana desa (Syamsi, 2014).

Hasil wawancara dalam penelitian ini menunjukkan bahwa warga desa hadir dalam pertemuan penyusunan dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran desa, namun tidak terdapat informasi yang jelas apakah mereka menghadiri seluruh pertemuan. Bisa saja hasil partisipasi masyarakat akan berpengaruh jika responden lebih banyak melibatkan para pengurus desa yang biasanya terlibat aktif dalam pembuatan keputusan. Selain itu responden perempuan mengisi 53% kuesioner. Hasil penelitian Nurhalimah (2018) menunjukkan bahwa partisipasi kaum perempuan dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa pada Desa Berakit terdapat pada tingkatan partisipasi di masyarakat di dengar dan di perkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak boleh memiliki kemampuan untuk mendapat jaminan bahwa pandangan meraka itu di pertimbangkan oleh pemegang kekuasaan. Jika kuesioner ini lebih banyak diisi oleh laki-laki mungkin akan menunjukkan hasil yang berbeda.

4.4.3. Akuntabilitas Keuangan Desa Berpengaruh Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Sedangkan hasil uji parsial lain terkait akuntabilitas berpengaruh terhadap persepsi APBDesa. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ultafiah (2017) dan Tiwinarni dan Taman (2018). Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil kuesioner, maka diperoleh hasil bahwa persepsi atas APBDes yang baik tersebut dipengaruhi oleh keterbukaan informasi, program yang jelas dan sesuai kebutuhan, serta adanya bukti-bukti pengeluaran yang dapat dipertangungjawabkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis diperoleh kesimpulan:

1. Partisipasi masyarakat dan akuntabilitas keuangan desa berpengaruh secara simultan terhadap persepsi anggaran pendapatan dan belanja desa. Partisipasi masyarakat ini terlihat dari kehadiran dalam proses pembuatan keputusan, memberi masukan dan menampung kebutuhan masyarat.
2. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh secara parsial terhadap persepsi anggaran pendapatan dan belanja desa. Meskipun hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian lain, namun bisa dilakukan pengumpulan kuesioner yang lebih banyak dengan responden laki-laki yang biasanya terlibat langsung dengan kegiatan di desa.
3. Akuntabilitas keuangan desa berpengaruh secara parsial terhadap persepsi anggaran pendapatan dan belanja desa. Bukti-bukti pembayaran dan laporan penggunaan dana telah disampaikan secara informatif dan transparan.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi APBDes didukung oleh partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Jika masyarakat terlibat dalam penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara akuntabel akan membentuk persepsi APBDes yang baik. Dana desa sebagai salah satu sumber pendanaan anggaran desa akan mampu dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Partisipasi masyarakat yang tidak berpengaruh secara parsial terhadap persepsi anggaran pendapatan dan belanja desa bisa terjadi karena tidak setiap pertemuan pembahasan APBDes dihadiri oleh para warga. Adanya mispersepsi perlu dibangun dengan cara membuat saluran komunikasi, seperti membagikan notulensi hasil rapat ke warga atau memasang di papan pengumuman, sebagaimana dalam penelitian Makalalag et al (2017) di Kotamobagu.

Keterbatasan dalam penelitian adalah mengukur persepsi dengan dua variabel partisipasi dan akuntabilitas. Beberapa variabel persepsi seperti kualitas laporan keuangan desa atau ketepatan waktu bisa digunakan dalam model agar mendapat hasil yang lebih signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Anjani, A. K. (2019). Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa. *Jurist-Diction*, *2*(3), 747-772.

Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, *3*(1).

Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, *334*.

Escobar-Lemmon, M., & Ross, A. D. (2014). Does decentralization improve perceptions of accountability? Attitudinal evidence from Colombia. *American Journal of Political Science*, *58*(1), 175-188.

Hanafie, H., Nugraha, A., & Huda, M. (2019). Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa Di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep). *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, *4*(1), 39-46.

Hanun, N. R. (2020). Persepsi *Stakeholders* Dalam Kesiapan Dan Pelaksanaan Pelaporan

Keuangan Desa Berbasis Undang-Undang No 6 Tahun 2014. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, *6*(01), 1-14.

Ibrahim, I., Rejeki, S., & Sawaludin, S. (2017). Persepsi masyarakat Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat terhadap Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, *5*(2), 1-6.

Istiqomah, S. (2015). Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Unair*, *3*(1), 1-18.

Imron, I. (2014). Pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama (Studi pada kelompok usaha bersama di Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, *2*(3), 485-491.

Indonesia, Pemerintah Republik (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Indonesia, K. K. R. (2017). Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017. In *Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa* TA. 2017

ICW, I. C. W. (2018). *Outlook* Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik.

Karyanto, R. (2016). Apakah Penyaluran Dana Desa Terhambat oleh Karakteristik Kepala Desa?. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, *16*(2), 149-161.

Kharisma, F., Paranoan, D. B., & Nasir, B. (2019). Persepsi Masyarakat terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan di kelurahan Singa Geweh Kabupaten Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur.

Komaling, A. A., Engka, D. S., & Sumual, J. I. (2020). *Persepsi Masyarakat terhadap Pemanfaatan Dana Desa di Desa Kanonang 2 Kecamatan Kawangkoan Barat*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 20 No. 01

Laksana, N. S. (2013). Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa dalam program desa siaga di Desa Bandung, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal kebijakan dan manajemen publik*, *1*(1).

Lusdani, W., & Ta'dung, Y. L. (2020). Dana Desa: Paradoks Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan. *Economix*, *8*(1).

Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintshan Desa. *Behavioral Accounting Journal*, *3*(1), 1-20.

Mardiyanto, V. (2015). Persepsi Pegawai Bidang Kearsipan Terhadap Jenjang Karis Berdasarkan Teori Atribusi (Stusi Deskriptif Kuantitatif Pada Lembaga Kearsipan dan Record Center di Universitas Gadjah Mada) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Kotamobagu Selatan kota Kotamobagu. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing " Goodwill", 8(1).

Nurhalimah, A. (2018). Partisipasi Kaum Perempuan Dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, *6*(2), 35-54.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.

Selfia, M. S., Afifuddin, A., & Sekarsari, R. W. (2020). Inovasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro *Open Government Partnership* (OGP) Dalam Mmeningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrakstruktur Desa (Studi pada Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro). *Respon Publik*, *14*(5), 14-25.

Kotler, Philip. (2001). *A Framework for Marketing Management*, Prentice Hall.

Tandi, P. (2020). Analisis Akuntabilitas Dana Desa di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara. *Ekomen*, *18*(2), 41-50.

Periansya, P., & AR, S. A. S. (2020). Dampak Kompetensi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengeloaan Dana Desa kecamatan Rambutan Banyuasin. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, *4*(1), 12-19.

Prasetyo, R. A., & Puspa, D. F. (2018). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kota Pariaman). *Jurnal Fakultas Ekonomi*, *13*(1).

Pangemanan, F. M., Rotinsulu, D. C., & Engka, D. S. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Penyusunan APBDesa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017. *Jurnal Pembanguan Ekonomi dan Keuangan Daerah.*

Pariangu, U. T. (2020). Inklusivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Berbasis Partisipasi

Masyarakat di Desa Air Mata, Kabupaten Kupang. *JAP UNWIRA*, *1*(1), 70-79.

Syamsi, Syahrul. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Malang: Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Suwanda, D. Junjunan, B.A & Rusliati, E.(2019) *Manajemen Resiko*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Solichin, S., & Akmal, S. (2018). Persepsi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, *7*(2), 20-26.

Tampubolon, J., Aluyah, C., & Heptiana, E. (2019). Persepsi masyarakat desa riding Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadao upaya pencegahan kebakaran di lahan gambut. *Sylva*, *7*(2), 49-57.

Tiwinarni, T., & Taman, A. (2018). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) se-Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, *6*(6).

Ultafiah, W. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palembang).

Wibowo, A. (2015). Pengaruh Promosi dan Lingkungan Kerja Karyawan Divisi Access PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Jakarta Pusat (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Jakarta).

Wang, X., & Wan Wart, M. (2007). When public participation in administration leads to trust: An empirical assessment of managers' perceptions. *Public administration review*, *67*(2), 265-278.

Yudhitaningsih, A. Y. S., & Safrida, L. (2018, December). Persepsi Perangkat Desa Mengenai Pelatihan, Motivasi, dan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan). In *Proceeding of National Conference on Asbis* (Vol. 3, pp. 100-112).

Yikwa, K., Naukoko, A. T., & Tumangkeng, S. Y. (2020). Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Lokasi Dana Desa dalam menunjang Pembangunan Pedesaan (Study kasus: 5 Desa Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara Papua). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, (*20*(02).